

**PENGARUH UMPAN BALIK ANGGARAN, EVALUASI
ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Novia Arizka Setiyadi
NIM. 14.0102.0086

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**PENGARUH UMPAN BALIK ANGGARAN, EVALUASI
ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Magelang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh :
Novia Arizka Setiyadi
NIM. 14.0102.0086

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

PENGARUH UMPAN BALIK ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Megelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Novia Arizka Setiyadi

NPM 14.0102.0086

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **16 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Muji Mranaji, S.E., M.Sc., AK., CA.

Pembimbing I

Arissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc.

Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Ketua

Fahda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris

Arissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

Dra. Marlina Kurba, MM.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Arizka Setiyadi
NIM : 14.0102.0086
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH UMPAN BALIK ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN,
KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, DAN
TEKNOLIGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH**

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bila mana diperlukan.

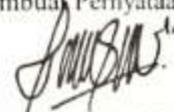
METERAI TEMPEL
Ag. 1 Agustus 2018
Pernyataan,
6000
Novia Arizka Setiyadi
NIM. 14.0102.0086

RIWAYAT HIDUP

Nama : Novia Arizka Setiyadi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Laahir : Magelang, 14 November 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Catgawen, 001/006, Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung
Alamat E-mail : noviarizka14@gmail.com

Pendidikan Formal:
Sekolah Dasar (2002-2008) : SD Negeri Gelangan 1 Kota Magelang
SMP (2008-2011) : SMP Negeri 4 Kota Magelang
SMA (2011-2014) : SMA Negeri 2 Kota Magelang
Perhuruan Tinggi (2014-2018) : SI Program Studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 1 Agustus 2018
Pembuat Pernyataan,



Novia Arizka Setiyadi
NIM. 14.0102.0086

MOTTO

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

“Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”. (Q.S. Yusuf:87)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S. Al-Imran:139)

“Hadapi masalahmu dan jangan menghindar, karena Allah selalu punya jalan keluar. Bawa sujud apa-apa yang belum terwujud, karena boleh jadi hari ini bukan perihal usaha kerasmu saja, tapi juga tentang doa-doa yang perlu kau langitkan pada yang Kuassa”. (Kang Ihsan)

KATA PENGANTAR

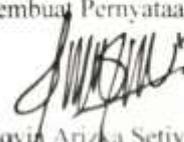
Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH UMPAN BALIK ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang).”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, peneliti tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, Ak selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Muji Mranani, SE, M.Si, Ak dan Anissa Hakim P, SE, M.Sc yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Ibu Farida, S.E., M.Si., AK., CA selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada saya.
6. Orang tua tercinta, Bapak Budi Setiyadi dan Ibu Siti Maesaroh yang telah memberikan dukungan moril dan materi, serta nenek dan adik saya, Sri Sutiyah Girahmi, Fitria Vici M, dan Septia Astri Nikita S yang telah banyak membantu kelancaran studi saya.
7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas doa dan bantuannya dalam terlaksananya skripsi ini.

Magelang, 1 Agustus 2018
Pembuat Pernyataan,



Novia Arizka Setiyadi
NIM. 14.0102.0086

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Riwayat Hidup	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori.....	9
1. Teori Penetapan Tujuan (<i>Goal Setting Theory</i>).....	9
2. Kinerja Pemerintah Daerah.....	10
3. Umpan Balik Anggaran	13
4. Evaluasi Anggaran.....	14
5. Komitmen Organisasi	15
6. Sistem Akuntansi Keuangan.....	17
7. Teknologi Informasi	18
B. Telaah Penelitian Sebelumnya.....	20
C. Perumusan Hipotesis	21
D. Model Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi Dan Sampel	27
B. Data Penelitian.....	27
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	28
D. Metode Analisis Data	32
E. Pengujian Hipotesis	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian	38
B. Statistik Deskriptif.....	38
C. Deskriptif Variabel Responden.....	39

D. Uji Kualitas Data	41
E. Uji Hipotesis	44
F. Pembahasan Hipotesis	50

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	57
B. Keterbatasan	59
C. Saran	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	38
Tabel 4.2 Profil Responden	39
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	42
Tabel 4.5 Cross Loading	42
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.7 Koefisien Regresi	44
Tabel 4.8 Uji R^2	46
Tabel 4.9 Uji F	47
Tabel 4.10 Uji T	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	26
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	36
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	37
Gambar 4.1 Penerimaan Uji F.....	47
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Umpan Balik anggaran.....	48
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Evaluasi Anggaran	49
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Komitmen Organisasi.....	49
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Sistem Akuntansi Keuangan	50
Gambar 4.6 Penerimaan Hipotesis Teknologi Informasi.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	65
Lampiran 2. Daftar OPD Kabupaten Magelang.....	73
Lampiran 3. Tabulasi Data Mentah.....	75
Lampiran 4. Tabulasi Data Diolah.....	87
Lampiran 5. Statistik Deskriptif.....	99
Lampiran 6. Uji Validitas.....	99
Lampiran 7. Uji Reliabilitas.....	104
Lampiran 8. Uji Analisis Regresi.....	106
Lampiran 9. Surat Ijin Riset dari Fakultas.....	107
Lampiran 10. Surat Ijin Riset dari Kesbangpol.....	108
Lampiran 11. Surat Ijin Riset dari DPMPTSP.....	109
Lampiran 12. Bukti Penyebaran Kuesioner.....	110

ABSTRAK

PENGARUH UMPAN BALIK ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang)

Oleh:

**Novia Arizka Setiyadi
NIM. 14.0102.0086**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Kabupaten Magelang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengirimkan 84 kuesioner kepada pegawai yang melaksanakan fungsi keuangan. Kuesioner yang kembali sebanyak 71 kuesioner, sedangkan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 48 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan, Teknologi Informasi, Kinerja Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang bertanggungjawab penuh dalam meningkatnya kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial dalam menjalankan aspek-aspek fungsional secara efektif dan efisien sehingga dapat terwujud *good public and corporate governance* (Mardiasmo, 2009: 27). Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota yang dikeluarkan Menteri PANRB Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang memperoleh predikat CC dari tahun 2012 sampai 2016. Predikat CC (nilai 50-65) mengindikasikan nilai “Cukup (memadai)” dan masih perlu banyak perbaikan. Bupati Magelang Zaenal Arifin menyatakan bahwa hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kabupaten Magelang masih dijumpai kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan Aparatur Pemerintah terhadap Perundang-undangan yang berlaku. (www.bpkp.go.id). Selanjutnya, Kabupaten Magelang tahun 2017 mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD. Dalam rapat paripurna, puluhan Kades ikut memantau jalannya rapat untuk melihat perkembangan pembahasan APBD 2017 (radarjogja.co.id).

Setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang benar-benar memahami dan melaksanakan sistem akuntansi

keuangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang telah ditetapkan. *Software* aplikasi digunakan untuk memudahkan pelaksanaan pembukuan. Oleh karena itu, SDM harus mampu dan mahir dalam mengoperasikan komputer serta memahami aplikasi prosedur penatausahaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka penatausahaan keuangan daerah mutlak diperlukan sumber daya manusia yang profesional di bidang teknologi informasi khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan implementasi paradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja diterapkan dalam penyusunan APBD, sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah (Damanik, 2017).

Beberapa undang-undang tentang otonomi daerah telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui beberapa kali revisi. Seperti Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 yang direvisi menjadi UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan dikeluarkannya Undang Undang tersebut, menjadikan lahirnya otonomi menjadikan penggeseran sistem pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat (Olinda, 2015).

Penelitian ini penting dilakukan, karena pengelolaan keuangan dalam pembangunan baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah merupakan kunci

dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Terdapat beberapa faktor yang dianggap sangat penting dan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi dengan baik dan tepat. Namun dalam hal ini sering terdapat masalah yang dapat menghambat lajunya pembangunan, tetapi seperti yang kita ketahui hambatan justru sering dialami oleh daerah (Verasvera, 2016). Faktor teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting dalam menunjang kinerja pemerintah daerah. Semakin baik aparat pemerintah daerah dalam menguasai teknologi informasi dan pemahaman terhadap sistem akuntansi daerah, maka kinerja akan meningkat.

Penelitian tentang kinerja pemerintah daerah telah banyak dilakukan, namun masih terdapat ketidakkonsistenan hasil terhadap penelitian tersebut. Penelitian tentang pengaruh umpan balik anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan hasil positif terdapat dalam penelitian Istiyani (2009), sedangkan hasil negatif terdapat pada penelitian Nurlelahayati (2017) dan Syurgawi (2015). Selanjutnya, pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan hasil positif terdapat dalam penelitian Nurlelahayati (2017) dan Syurgawi (2015), sedangkan hasil negatif terdapat dalam penelitian Istiyani (2009). Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan hasil positif terdapat dalam penelitian Nurlelahayati (2017) dan Damanik (2017), sedangkan hasil negatif terdapat dalam penelitian Mufarrohah (2013). Kemudian, pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan hasil positif terdapat

dalam penelitian Damanik (2017). Terakhir, pengaruh teknologi Informasi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan hasil positif terdapat dalam penelitian Wijayanti (2017), sedangkan hasil negatif terdapat dalam penelitian Damanik (2017).

Riset terdahulu tentang kinerja pemerintah daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Nurlelahayati pada tahun 2017 di kota Lhokseumawe. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umpan balik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD, sedangkan evaluasi anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD. Nurlelahayati menganjurkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan sampel yang lebih besar sehingga dapat menggeneralisasi hasil penelitian dan memperhatikan unsur-unsur lain diluar aparat SKPD yang terlibat secara tidak langsung dalam anggaran.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlelahayati, dkk (2017). Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, **pertama** adalah menambahkan variabel Sistem Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi, alasan ditambahkan variabel Sistem Akuntansi Keuangan adalah karena dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi keuangan untuk pengelolaan dana dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan akan menghasilkan laporan

keuangan yang baik, laporan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator bahwa organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik pula. Semakin baik sistem akuntansi keuangan yang diterapkan organisasi maka semakin baik pula kinerja organisasi (Damanik, 2017). Sedangkan Teknologi Informasi, ditambahkan karena pemanfaatannya TI yang tepat didukung dengan keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja organisasi/perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan (Oktari, 2010).

Perbedaan **kedua**, melakukan penelitian pada OPD Kabupaten Magelang karena dalam implementasi kinerja pemerintah di Kabupaten Magelang belum terealisasi dengan baik. Terbukti dengan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota yang dikeluarkan Menteri PANRB yang menyatakan bahwa kabupaten Magelang memperoleh predikat CC dari tahun 2012 sampai 2016. Hal tersebut dimungkinkan adanya faktor yang mempengaruhi kinerja yang masih belum maksimal.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

4. Apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
5. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh umpan balik anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu masa kini dalam mengembangkan akuntansi khususnya akuntansi sektor publik itu sendiri yang sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis:

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi referensi maupun tinjauan untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja pemerintah daerah dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik, khususnya di Pemerintah Kabupaten Magelang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini merupakan urutan penulisan yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara sederhana mengenai isi dan materi. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan perumusan hipotesis, bab ini membahas tentang pembahasan dari permasalahan secara teoritis yang didasarkan pada literatur, bahan pustaka, dan sumber ilmiah yang berguna sebagai acuan perbandingan hasil penelitian, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini meliputi rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan diuraikan tentang analisis deskriptif dan perhitungan skor variabel independen dan dependen, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

BAB V Kesimpulan, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* merupakan salah satu bentuk teori motivasi. *Goal Setting Theory* menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. *Goal Setting Theory* mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan (Locke and Latham, 1990).

Konsep penetapan tujuan berisi tentang adanya kejelasan, tujuan yang menantang, berkomitmen untuk mencapainya, memberikan umpan balik pada kinerja, dan mempertimbangkan kompleksitas tugas. Komitmen merupakan faktor yang penting dalam organisasi, karena karyawan akan lebih cenderung memiliki tujuan jika mereka merasa mereka adalah bagian dari penciptaan tujuan tersebut. Gagasan manajemen partisipatif terletak pada ide melibatkan karyawan dalam menetapkan tujuan dan membuat keputusan. Selain komitmen, umpan balik juga memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi harapan, menyesuaikan kesulitan sasaran, dan mendapatkan pengakuan. Sangat

penting untuk memberikan kesempatan *benchmark* atau target, sehingga individu dapat menentukan sendiri bagaimana mereka melakukan tugas. Salah satu cara untuk mengukur kinerja aparat pemerintah adalah dengan evaluasi anggaran, evaluasi anggaran dapat menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Anggaran yang digunakan dalam evaluasi kinerja cenderung mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan.

Teori ini juga memungkinkan manajemen untuk melakukan diagnosis kesiapan, misalnya apakah tenaga kerja, organisasi dan teknologi sesuai dengan program *goal setting* dan mempersiapkan tenaga kerja berkenaan dengan interaksi antara individu, komunikasi, pelatihan (*training*) dan perencanaan. Sistem akuntansi keuangan yang baik dan terus dikembangkan, maka dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Selain itu, teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja organisasi/perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

2. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja menurut Bastian (2009) menyatakan bahwa : “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi?”. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Tolok ukur kinerja dimaksud merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan (Permendagri No.13/2006 pasal 95 dan 96).

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu (Surjadi, 2009:7). Kinerja (*performance*) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi (Stoner dan Charles, 1986).

Keberhasilan atau kegagalan yang dicapai oleh suatu organisasi sektor publik khususnya pemerintah tidak hanya dilihat dari perspektif keuangan. Keberhasilan organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerja anggaran. Hal ini sesuai dengan pendekatan didalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja yang merupakan implikasi dari penetapan Undang-Undang No.17 Tahun 2003. Kinerja anggaran diadopsi secara

luas untuk memeriksa seberapa baik organisasi melakukan pelaksanaan anggaran mereka dan seberapa efektif setiap alasan sehingga anggaran yang dianggap oleh semua dalam sebuah organisasi (Hansen dan Stede, 2004). Kinerja anggaran juga terkait dengan set yang relatif berbeda dari karakteristik penganggaran, seperti pilihan kesulitan sasaran, jumlah partisipasi dalam proses penganggaran, dan jumlah penekanan pada pencapaian target anggaran (Mui Yee at al, 2016).

Syafrial (2009) mendefinisikan kinerja pada sektor pemerintah sebagai suatu prestasi yang dapat dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Kinerja organisasi sektor public adalah hasil akhir (*output*) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien sesuai dengan kehendak pengguna jasa, informasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai (Wahyudi, 2005).

Kinerja mencerminkan ekonomis, efisiensi dan efektifnya suatu pelayanan publik yang dilakukan oleh SKPD secara khusus dan pemerintah daerah secara umum (Mardiasmo, 2009). Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi/SKPD secara teknis dapat mencapai tingkat ekonomis, efisien dan efektif dalam penyediaan administrasi dan penyediaan jasa untuk masyarakat (Mardiasmo, 2009). Mahsun (2006:198) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja

pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Elemen penting dalam mengukur indikator kinerja yaitu: kebijakan (*policy*), perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*), kualitas (*quality*), keadilan (*equity*), pertanggungjawaban (*accountability*) (Mahsun et al, 2011).

3. Umpan Balik Anggaran

Kenis (1979) menyatakan bahwa umpan balik terhadap tujuan anggaran yang telah dicapai merupakan variabel penting yang memberikan motivasi. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil yang diperoleh dari upayanya untuk mencapai sasaran, maka ia tidak mempunyai dasar untuk merasakan keberhasilan atau kegagalan, dan tidak ada insentif untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan pada akhirnya menjadi tidak puas.

Umpan balik anggaran merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting dalam proses pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja. Umpan balik pada kinerja, ketika disajikan dalam konstruktif dan obyektif terbukti cukup penting sebagai motivator dalam memberikan estimasi yang handal dalam proses penganggaran (Yuen, 2004). Umpan balik anggaran tidak hanya dapat memverifikasi dan memperbaiki kinerja yang diharapkan, tetapi juga memberikan bantuan untuk memprediksi anggaran masa depan (Magner et al, 1996).

Seseorang melakukan sesuatu dengan lebih baik bila mereka memperoleh umpan balik mengenai seberapa mereka maju ke arah tujuan karena umpan balik membantu mengidentifikasi penyimpangan antara yang mereka kerjakan dan yang mereka ingin kerjakan (Ivancevich, 1976). Mereka juga akan terus mengevaluasi kecukupan hasil dengan membandingkan umpan balik yang diterima dari hasil untuk tujuan terkait yang ditugaskan oleh organisasi (Wofford dan Goodwin, 1990).

Di satu sisi karyawan dapat termotivasi untuk mengubah perilaku kerja mereka, di sisi lain jika karyawan merasa umpan balik tidak akurat atau tidak berguna dan tidak puas dengan hasil ini, mereka akan cenderung mengabaikan komentar dan tidak menggunakan saran yang mereka terima (Jawahar, 2010). Oleh karena itu, efektivitas umpan balik, atau sejauh mana tanggapan melayani tujuan motivasi dan peraturan, dapat bergantung pada persepsi karyawan dari umpan balik (Cusella, 1987).

4. Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979). Cara di mana anggaran yang digunakan dalam evaluasi kinerja cenderung mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan (Hansen dan Stede, 2004; Mui Yee at al, 2016).

Evaluasi anggaran terlihat pada siklus anggaran tahap keempat, yaitu tahap pelaporan dan evaluasi anggaran yang terkait dengan aspek akuntabilitas (Mardiasmo, 2009). Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya (Mahsun et al, 2011). Evaluasi anggaran adalah kebijakan dan prosedur untuk mengevaluasi antara sasaran dan realisasi. Evaluasi yang dilakukan secara periodik menjadi proses pengendalian anggaran dan hasil evaluasi anggaran menjadi umpan balik bagi pelaksana anggaran.

Evaluasi merupakan kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan (Laoli, 2012). Evaluasi anggaran mengukur sejauh mana selisih anggaran program dan kegiatan SKPD yang ditelusuri oleh pimpinan masing-masing bawahan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran.

5. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat dengan organisasinya. Seorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Sebaliknya, seorang individu yang memiliki komitmen yang rendah lebih cenderung untuk melihat dirinya sebagai orang luar untuk mengekspresikan ketidakpuasan yang

lebih besar menyangkut kondisi kerja, dan tidak ingin melihat dirinya sendiri menjadi anggota jangka panjang dari organisasi (Griffin, 2002).

Menurut Luthans (2011:147), konsep komitmen organisasi merupakan pendekatan sikap dimana komitmen didefinisikan sebagai: (1) keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi; dan (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Selanjutnya, Mathis dan Jackson (2006:122) mengemukakan bahwa komitmen organisasi adalah tingkat sampai dimana seorang karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi tersebut.

Komitmen organisasi menurut Mowday et al. (1982) adalah sebagai *the relative strength of an individual's identification with and involvement in a particular organization*. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Komitmen organisasi sebagai sikap, paling sering didefinisikan sebagai: (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi; dan (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

6. Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian secara sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (Sukmana, 2009). Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap, dan prosedur akuntansi selain kas (Silalahi, 2012).

Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi telah diatur dalam Standar Akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi (Halim, 2012).

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa “sistem akuntansi pemerintah daerah adalah Serangkaian prosedur mulai dari

proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

7. Teknologi Informasi

Teknologi merupakan sisi *supply* dari kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah (Hariningsih, 2005). Sedangkan menurut Simarmata (2006), teknologi dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan peralatan, proses, dan sumber daya. Teknologi informasi mengacu pada suatu item yang bermacam-macam dan kemampuan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran data serta informasi (Simarmata, 2006).

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja organisasi/perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan (Nasir & Oktari, 2010). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi ini sangat mempengaruhi kinerja, dimana teknologi informasi ini diperlukan untuk mengolah data yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data yang akan menghasilkan data laporan mingguan, bulanan, triwulan serta laporan tahunan.

Perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan oleh organisasi bisnis saja namun juga organisasi publik termasuk pemerintah. Dalam

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan kepada publik.

Teknologi informasi pada pemerintahan digunakan untuk keperluan sehari-hari, mulai dari administrasi perkantoran sampai pelayanan publik pemerintahan terhadap masyarakat. Penggunaan teknologi informasi di institusi pemerintah biasanya dalam bentuk *software*, seperti *office automation* dengan paket *Microsoft Office*. *Software* tersebut dapat digunakan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang akuntansi dalam hal pembuatan laporan keuangan dan laporan yang lainnya. Selain itu juga untuk keperluan pendidikan dan kepentingan khusus lainnya (Idris, 2015).

Menurut Syaifullah (2015), teknologi informasi yang dikembangkan dalam pemerintah disebut dengan *e-government* yang membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. *E-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi yang menggunakan internet dan intranet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Nurlelahayati, dkk (2017)	Umpan Balik Anggaran Evaluasi Anggaran Komitmen Organisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Umpan balik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Kota Lhokseumawe. Evaluasi anggaran dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Kota Lhokseumawe.
2.	Damanik (2017)	Sistem Akuntansi Keuangan Teknologi Informasi Komitmen Organisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Sistem akuntansi keuangan dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD.
3.	Wijayanti, dkk (2017)	Karakteristik Individu Pemanfaatan Teknologi Informasi Kinerja Pegawai	Karakteristik individu dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
4.	Chintya (2015)	Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Pengendalian Intern Kinerja Instansi Pemerintah	Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
5.	Silalahi (2012)	Anggaran berbasis Kinerja Sistem akuntansi Keuangan Daerah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penilaian SKPD	Anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penilaian SKPD.
6.	Friyanti (2016)	Partisipasi anggaran Evaluasi anggaran Umpan Balik anggaran sistem Pengendalian Intern Kejelasan Sasaran	Partisipasi Anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajemen pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		Anggaran	Sedangkan kejelasan sasaran
		Kinerja Manajerian	anggaran tidak berpengaruh.
		Pemerintah Daerah	
7.	Olinda (2015)	<i>Good governance</i>	<i>Good governance,</i>
		Pengendalian Intern	pengendalian intern, gaya
		Budaya Organisasi	kepemimpinan, dan
		Gaya Kepemimpinan	komitmen organisasi
		Komitmen	berpengaruh terhadap kinerja
		Organisasi	pemerintah daerah.
		Kinerja Pemerintah	Sedangkan budaya
		Daerah	organisasi tidak berpengaruh
			terhadap kinerja pemerintah
			daerah.

Sumber: data penelitian terdahulu, 2018

C. Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh Umpan Balik Anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

Umpan balik anggaran merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting dalam proses pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja. Umpan balik pada kinerja, ketika disajikan dalam konstruktif dan obyektif terbukti cukup penting sebagai motivator dalam memberikan estimasi yang handal dalam proses penganggaran (Yuen, 2004). Berdasarkan teori penetapan tujuan atau *goal setting theory*, umpan balik sangat penting untuk memberikan kesempatan target, sehingga aparat pemerintah dapat menentukan sendiri bagaimana mereka melakukan tugas. Seseorang aparat pemerintah akan melakukan kinerjanya dengan baik apabila mereka memperoleh umpan balik yang sebanding dengan kinerjanya untuk mencapai tujuan OPD.

Penelitian Istiyani (2009), Pratiwi (2012), dan Friyanti (2016) menunjukkan bahwa umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1. *Umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.*

b. Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979). Berdasarkan teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* , evaluasi anggaran dapat menjadi salah satu cara untuk mengukur kinerja aparat pemerintah, evaluasi anggaran dapat menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Anggaran yang digunakan dalam evaluasi kinerja cenderung mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah.

Penelitian Nurlelahayati, dkk (2017), Syurgawi (2015), dan Friyanti (2016) menunjukkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. *Evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.*

c. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauhmana seorang individu mengenal dan terikat dengan organisasinya (Griffin, 2002). Berdasarkan teori penetapan tujuan atau *goal setting theory*, komitmen merupakan faktor yang penting dalam organisasi, karena aparat pemerintah akan lebih cenderung memiliki tujuan jika mereka merasa mereka adalah bagian dari penciptaan tujuan tersebut. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi dan akan berdampak baik terhadap kinerjanya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki komitmen yang rendah lebih cenderung untuk melihat dirinya sebagai orang luar untuk mengekspresikan ketidakpuasan yang lebih besar menyangkut kondisi kerja, dan tidak ingin melihat dirinya sendiri menjadi anggota jangka panjang dari organisasi.

Penelitian Nurlelahayati, dkk (2017), Damanik (2017), dan Olinda (2015) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3. *Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.*

d. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian secara sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (Sukmana, 2009). Berdasarkan teori penetapan tujuan atau *goal setting theory*, dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan terus dikembangkan, maka dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan.

Penelitian Damanik (2017), Annisa (2017), dan Tuasikal (2012) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4. *Sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.*

e. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

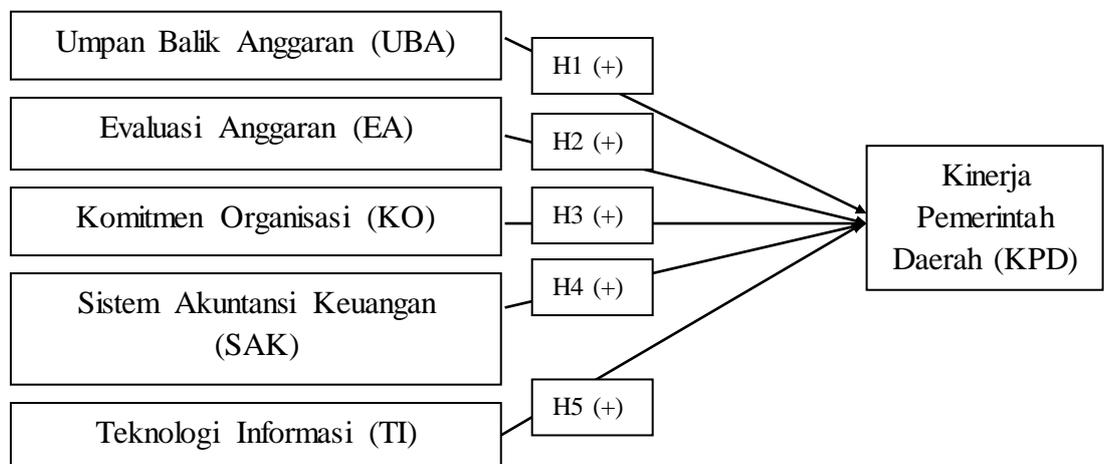
Teknologi informasi mengacu pada suatu item yang bermacam-macam dan kemampuan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran data serta informasi (Simarmata, 2006). Teknologi informasi sangat mempengaruhi kinerja, dimana teknologi informasi diperlukan untuk mengolah data yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data yang akan menghasilkan data laporan mingguan,

bulanan, triwulan serta laporan tahunan. Berdasarkan teori penetapan tujuan atau *goal setting theory*, teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian individu aparat pemerintah yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah yang bersangkutan dengan wujud tercapainya tujuan OPD.

Penelitian Wijayanti, dkk (2017), Chintya (2015), dan Susanti (2013) menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5. Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah yang ada pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *non-probability* yaitu *purposive sampling* yang menggunakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan yaitu (1) Kepala sub bagian keuangan, (2) staf pejabat penatausahaan keuangan dan staf akuntansi atau pembukuan, karena mereka dianggap mengetahui kebijakan organisasi, pengambil kebijakan, pelaksana dan bertanggungjawab terhadap kinerja keuangan pada OPD masing-masing. Pengambilan objek penelitian dipemerintah daerah disebabkan adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat agar pemerintah lebih efisien, transparan dan akuntabel dalam implementasi APBD yang berasal dari uang rakyat.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer, dimana data-data penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber-sumber asli yang berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang berupa beberapa pertanyaan

secara terstruktur, dimana responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada beberapa alternatif tertentu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada kantor OPD Kabupaten Magelang, kuesioner dikirimkan sendiri oleh peneliti secara langsung kepada masing-masing kantor. Pengiriman kuesioner tersebut rencananya dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat pengembaliannya (*response rate*) kuesioner bias lebih tinggi, sedangkan untuk pengambilan kuesioner dengan penetapan batas akhir tanggal pengambilan kuesioner. Sebelum pengambilan kuesioner, sehari sebelumnya peneliti menghubungi masing-masing dinas via telpon untuk memastikan apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden telah diisi sesuai dengan kriteria responden dan sudah bisa diambil.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Kinerja Pemerintah Daerah

Syafrial (2009) mendefinisikan kinerja pada sektor pemerintah sebagai suatu prestasi yang dapat dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Variabel ini diukur dengan lima indikator, yaitu: (1) Pencapaian target, (2) Tepat waktu dalam penyelesaian tugas, (3) Kualitas pekerjaan yang baik, (4) Inisiatif bekerja, dan (5) Pencapaian dan pelaksanaan program organisasi. Variabel ini mengadopsi instrumen dari

Yuliani (2010) yang juga mengadopsi dari Baron dan Greenberg, (1990). Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin, yaitu 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju, yang terdiri dari 5 item pernyataan.

2. Umpan Balik Anggaran

Umpan Balik terhadap tujuan anggaran yang telah dicapai merupakan variabel penting yang memberikan motivasi. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil yang diperoleh dari upayanya untuk mencapai sasaran, maka ia tidak mempunyai dasar untuk merasakan keberhasilan atau kegagalan, dan tidak ada insentif untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan pada akhirnya menjadi tidak puas (Kenis, 1979). Variabel ini diukur dengan empat indikator yaitu: (1) Jumlah perolehan umpan balik mengenai pencapaian tujuan anggaran, (2) Adanya umpan balik dan pedoman mengenai penyimpangan anggaran, (3) Respon atasan terhadap tujuan anggaran, dan (4) Respon atasan atas tercapainya tujuan anggaran yang telah ditetapkan.

Instrumen pengukuran diadopsi dari Istiyani (2009) yang mengadopsi instrumen dari Maryanti (2002) dan Munawar (2006). Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin, yaitu 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju, yang terdiri dari 7 item pernyataan.

3. Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran didefinisikan sebagai tindakan penelusuran penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979). Variabel ini diukur dengan lima indikator yaitu: (1) Pemberitahuan tentang penyimpangan anggaran, (2) Siapa yang bertanggungjawab atas penyimpangan anggaran, (3) Kapan evaluasi anggaran dilakukan, (4) Respon atasan terhadap penyimpangan anggaran yang besar, dan (5) Fungsi anggaran sebagai pengawasaan. Variabel ini mengadopsi instrumen dari Istiyani (2009) yang juga mengadopsi dari Kenis (1979). Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin, yaitu 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju, yang terdiri dari 7 item pernyataan.

4. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauhmana seorang individu mengenal dan terikat dengan organisasinya. Seorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Sebaliknya, seorang individu yang memiliki komitmen yang rendah lebih cenderung untuk melihat dirinya sebagai orang luar untuk mengekspresikan ketidakpuasan yang lebih besar menyangkut kondisi kerja, dan tidak ingin melihat dirinya sendiri menjadi anggota jangka panjang dari organisasi (Griffin, 2002). Variabel ini diukur dengan tiga indikator, yaitu: (1) Kemauan pegawai,

(2) Kesetiaan pegawai, dan (3) Kebanggaan pegawai. Variabel ini mengadopsi instrumen dari Ferdiani (2012) yang mengadopsi dari Mowday et al (1979). Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin, yaitu 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju, yang terdiri dari 9 item pernyataan.

5. Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian secara sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (Sukmana, 2009). Variabel ini diukur dengan sembilan indikator, yaitu: (1) kesesuaian dengan SAP, (2) identifikasi transaksi, (3) identifikasi pencatatan, (4) bukti transaksi, (5) pencatatan secara kronologis, (6) pengklasifikasian transaksi, (7) pengukuran dan pelaporan, (8) periode akuntansi, dan (9) pelaporan yang periodik. Variabel ini mengadopsi instrumen dari Permadi (2013). Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin, yaitu 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju, yang terdiri dari 10 item pernyataan.

6. Teknologi Informasi

Teknologi informasi mengacu pada suatu item yang bermacam-macam dan kemampuan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran data serta informasi (Simarmata, 2006). Variabel ini diukur dengan menggunakan enam indikator, yaitu: (1)

Sisten akuntansi sesuai dengan SAP, (2) Kapasitas komputer, (3) Laporan keuangan terkomputerisasi, (4) Jaringan internet dimanfaatkan, (5) *Software* yang digunakan, dan (6) Penjadwalan pemeliharaan dan perawatan. Variabel ini mengadopsi instrumen dari Hanin (2013). Diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin, yaitu 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju, yang terdiri dari 8 item pernyataan.

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, dan lama masa kerja (Ghozali, 2016: 19).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Menurut Ghozali (2016: 52), uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam menguji validitas instrumen kuisisioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan

Confirmatory Factor Analysis (CFA). CFA merupakan salah satu bentuk analisis faktor khususnya dalam penelitian sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah indikator-indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruksinya atau tidak.

Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)*. Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $>0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor dan *cross loading* $>0,50$ untuk menentukan kevalidan dari setiap item pernyataan.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghazali (2016: 43), yaitu jika koefisien Cronbach Alpha $> 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien Cronbach Alpha $< 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KPD = \alpha + \beta_1 UBA + \beta_2 EA + \beta_3 KO + \beta_4 SAK + \beta_5 TI + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

KPD = Kinerja Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi

UBA = Umpan Balik Anggaran

EA = Evaluasi Anggaran

KO = Komitmen Organisasi

SAK = Sistem Akuntansi Keuangan

TI = Teknologi Informasi

ε = Kesalahan Estimasi (estimation errors)

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

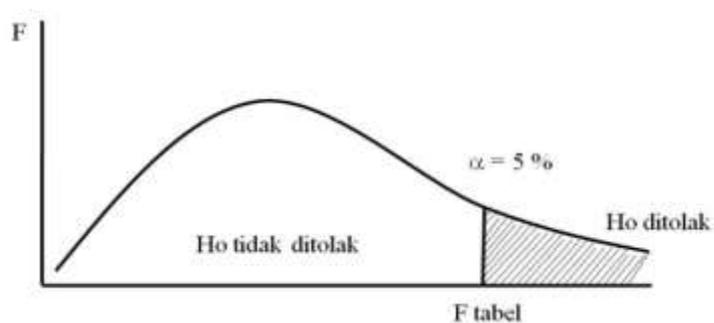
Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Menurut Ghozali (2016: 95), nilai R^2 yang kecil mengandung arti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang hampir mendekati satu mengandung arti bahwa variabel bebas memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual. Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah model yang digunakan fit atau tidak fit (Ghozali, 2016: 97). Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan perbandingan antara F hitung dan F tabel. Tingkat signifikansi pada penelitian ini sebesar 5% dengan derajat pembilang (df_1) = k dan derajat kebebasan penyebut (df_2) = n-k-1 dengan n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan kriteria:

- a. Jika F hitung > F tabel atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*).
- b. Jika F hitung < F tabel atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya model yang digunakan tidak bagus (*tidak fit*).

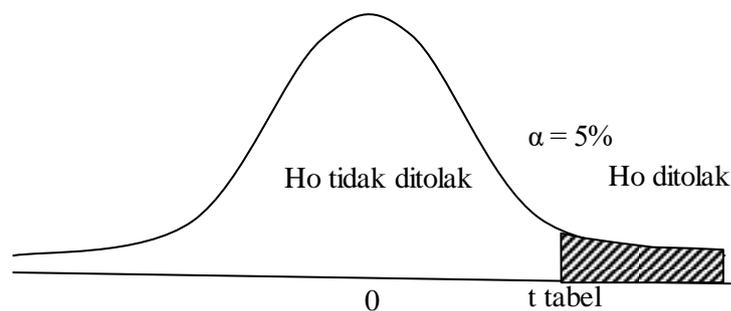


Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

3. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016: 97). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-1$ sebagai berikut:

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Kabupaten Magelang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan data yang dapat diolah sebanyak 48 responden. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji *R square* menunjukkan besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,306, yang berarti bahwa kemampuan variabel umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi dalam menjelaskan variasi kinerja pemerintah daerah sebesar 30,6%. Sedangkan lainnya dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai $p \text{ value} < \alpha$ ($0,00 < 0,05$) dan *F* hitung sebesar 5,137. Berdasarkan jumlah $n=48$ dan $k= 5$, maka $df_1= 5$, $df_2= 42$ maka diperoleh nilai *F* tabel sebesar 2,44. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $F \text{ hitung } 5,137 > F \text{ tabel } 2,44$ yang berarti bahwa model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah baik atau *fit*.

3. Hasil menunjukkan bahwa Umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Evaluasi anggaran, Komitmen organisasi, Sistem akuntansi keuangan, dan Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

B. Keterbatasan

1. Hasil uji *R square* menunjukkan bahwa variabel umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi bernilai 0,306 (30,6%). Sedangkan sebanyak 69,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini. Hal ini berarti masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada satu wilayah yaitu badan dan dinas Kabupaten magelang, sehingga generalisasi penelitian ini perlu kehati-hatian.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan sebagai pertimbangan, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas seperti kualitas SDM dari penelitian Dewi, dkk (2015), karena Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah sampel atau menambah objek penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Aswati, W. O., & Astrinigita, A. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Senjangan Anggaran Terhadap Kinerja Pejabat Eselon Iii Dan Iv Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2).
- Asrini, A. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Skpd Di Pemerintah Daerah Kota Palu. *Katalogis*, 5(1).
- Asrini, P. A., Adiputra, I. M. P., Si, M., Herawati, N. T., & AK, S. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 3(1).
- Badan Pemeriksaan Keuangan, 2013. *Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013*, (Online).
- Bastian, indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Becker, S., Green, D. 1962. *Budgeting and Employee Behavior. Journal of Business*. 3(14), 392-402.
- Damanik, E. S. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan, Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo. *Jurnal of Economics and Business*, 1(1), 51–69.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE.
- Griffin, Jill 2002. *Customer Loyalty How to Earn It, How to Keep It Kentucky*: McGraw-Hill.
- Halim, A. & Iqbal, M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- <http://www.bpk.go.id/>
- <http://www.radarjogja.co.id//>
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Istiyani. 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung. (Tesis).
- Kenis, Izzettin 1979. *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*, *The Accounting Review*. 54 (4), 707-721.
- Laoli, V. 2012. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja dengan Sikap Aparat Pemerintah Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Nias)*. Tesis. Medan: Program Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara.
- Latham, Gary P, dan E. A. Locke. 1990. "A Theory of Goal Setting and Task Performance". *The Academy of Management Review*.
- Magner, N., Welker RB., Campbell, TL. (1996). *Testing a model of cognitive budgetary participation processes in a latent variable structural equations framework*. *Account. Bis. Res.* 27 (1), 41-50.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanurgraha, H. A. 2011. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mas'ud, Fuad. 2004. *Survai Diagnosis Organisasional, Konsep, dan Aplikasi*. Semarang: BP Undip.
- Mathis, R. L & J. H. Jackson. 2006. *Human Resurce Management, Alih Bahasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Matondang, N. I., Basri, H., & Arfan, M. 2015. Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Skpd Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(4).
- Mowday, R.T., Steers R.M., Porter, L.W. 1982. *Employee Organization Linkages*:
- Mui Yee, C., Wong Sek Khin, E., Ismail, K. 2016. *An Analysis of Budgetary Goals Impacting Organizational Performance, Audit Financiar*.XIV. 5 (137).
- Mustafa, S., Sutrisno & Rosidi. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada

SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Universitas Haaluoleo, Kendari*.

Nasir, A & Oktari, R. 2010. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)*.
<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article>

Nurlelahayati, N., & Indriani, M. 2017. Pengaruh Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 134-150.

Olinda, M. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris Pada Skpd Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM. FEKON*, 2(2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006*.

Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.

Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.

Republik Indonesia, 2008. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi. Indonesia: Konsep Kontroversi, Aplikasi, Alih Bahasa: Hadayana Pujatmaka*. Jakarta: Prehalindu.

Silalahi, S.P. 2012. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (studi Pemerintahan di Kota Dumai). *Jurnal Ekonomi, Volume 20, Nomor 3, September 2012.*

Sukmana, W. & Anggarsari, L. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009.*

Verasvera, F. A. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen, 15(2), 137–162.*

Wijayanti, W. S., Sjahrudin, H., & Razak, N. 2017. *Pengaruh Karakteristik Individu dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai.*

Yuen, Desmond C.Y. 2004. *Goal Characteristic, Communication and Reward Systems, and Managerial Propensity to Create Budgetary Slack. Managerial Auditing Journal. 19 (4).*